

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP
KUALITAS PERTANGGUNG JAWABAN LAPORAN KEUANGAN PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KOTA SORONG**

Jordan Tiblola

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Victory Sorong

Email : Jordantiblola@Gmail.Com

ABSTRACT

This study was conducted to analyze and test the effect of applying government accounting standards on the quality of financial statement presentation at the Sorong City Government. This research was conducted at the Sorong City Government. This research used a descriptive quantitative approach, namely explaining in the form of tables and graphs the condition of objects and research results with the help of simple regression data analysis. In this context, research is expected to provide information or knowledge about the effect of applying government accounting standards on the quality of financial statement presentation to the Sorong City government, as well as being input and reference for making decisions about government accounting standards for the quality of financial statement presentation. positive on the quality of the presentation of financial reports at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Sorong City. The results of the analysis of determination show the independent variable (quality of financial statements) and is explained by the independent variable (SAP application).

Keywords: *SAP implementation, Financial Statement Presentation, Sorong City Government, Accounting Standards.*

PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintah merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat tuntutan transportasi dan akuntabilitas public atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi. Oleh karena itu instansi pemerintah itu sendiri juga memerlukan suatu standard akuntansi di bidangnya tersendiri dalam menjalankan aktivitas layanan kepada

masyarakat luas. Dengan ditetapkannya sistem akuntansi pemerintah maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal ini memadai dimulainya suatu era baru dalam pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Era globalisasi sekarang ini, menuntut perwujudan sebuah pemerintahan yang baik melalui sistem tata pemerintah yang baik (*good governance*), yaitu dengan cara menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya perubahan di bidang akuntansi pemerintah, karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan untuk berbagai pihak. Perubahan di bidang akuntansi harus didasari dengan suatu dasar yang kuat yaitu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia KSAP (Komite Standar Akuntansi pemerintah) telah berhasil menyusun suatu standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan presiden sebagai peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah di Negara Indonesia yang telah bergerak ke arah yang lebih baik. Kegagalan pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan keuangan akan berdampak serta merugikan mereka sendiri. Karena mereka tidak akan dapat memenuhi tujuan khusus pelaporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya menggunakan sistem akuntansi pemerintah yang diinginkan karena membutuhkan sumber daya manusia yang memahami dengan betul, maupun membaca, menyusun laporan keuangan mengaplikasikan system pencatatan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Seorang pemimpin Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah diharapkan tidak tergesa-gesa dalam mengimplementasikan gagasannya sebelum memahami dengan baik dan benar untung rugi dalam penyusunan rencana kerja, karena sebuah keputusan yang diambil akan berdampak pada kinerjanya di kemudian hari maka perlu dilakukan analisa terhadap laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan.

PEMBAHASAN

Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standandar akuntansi pemerintah, standard akuntansi pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hokum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar akuntansi pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah tersebut terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Standard akuntansi pemerintah merupakan acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Standar akuntansi pemerintah dapat menjadi transparansi dan akuntabilitas. Standar akuntansi pemerintah dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Akuntansi keuangan pemerintahan sekarang memasuki Era Desentralisasi, maka pelaksanaan akuntansi pemerintah itu ada di daerah-daerah (provinsi ataupun Kabupaten), kemudian daerah-daerah tersebut menyampaikan laporan pemerintah pusat. Oleh pemerintah dibuatkan menjadi laporan konsolidasi yang merupakan laporan keuangan pemerintah RI. Akuntansi keuangan daerah adalah suatu system informasi pengidentifikasi, pencatatan, pengklasifikasian, mengikhtisarkan dan mengkomunikasikan kegiatan suatu daerah berupa pelaporan untuk pengambilan keputusan. Untuk perlakuan akuntansi keuangan daerah penyusunannya harus mengikuti PSAP yang telah dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tanggal 13 juni 2005, yaitu PSAP Nomor 1 sampai dengan nomor 11, dimana hasil proses akuntansinya adalah : neraca, laporan realisasi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.

Tiap-tiap daerah merupakan satu entitas-entitas yang akan membuat laporan keuangannya dan diserahkan ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang juga sebagai suatu entitas akan menggabungkan laporan keuangan daerah-daerah tersebut kemudian membuat laporan keuangan Negera RI yang telah dikonsolidasikan sesuai dengan PSAP Nomor 11.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Komponen Laporan Keuangan menurut PSAK No.1 (2012) bahwa laporan keuangan yang lengkap yang disusun oleh manajemen suatu perusahaan harus meliputi komponen-komponen berikut ini :

- a. Neraca : Merupakan laporan keuangan yang berisi mengenai jumlah harta (*assets*), kewajiban (*liability*), dan modal (*owner's equity*) pada akhir periode akuntansi. Neraca dapat member informasi tentang sumber-sumber daya yang di miliki perusahaan dan sumber pembelanjaan untuk memperolehnya. Laporan ini menyajikan posisi keuangan perusahaan.
- b. Laporan Laba Rugi Komprehensif : Merupakan suatu laporan sistematis yang menyajikan seluruh pos pendapatan dan beban yang diakui dalam suatu periode. Laporan laba rugi komprehensif perusahaan di sajikan sedemikian rupa yang menggambarkan berbagai unsure kinerja keuangan selama suatu periode tertentu.
- c. Laporan Arus Kas : Laporan yang menyajikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan investasi, pembelanjaan, dan kegiatan usaha pada suatu periode. Arus kas dari aktivitas operasi merupakan arus kas yang langsung berhubungan dengan laba, seperti penerimaan kas dari pelanggan pembayaran gaji karyawan perusahaan. Arus kas yang berasal dari aktivitas investasi mencakup arus kas yang terkait dengan akuisisi atau penjualan asset tetap perusahaan. Arus kas pendanaan merupakan arus kas yang berhubungan langsung dengan pendanaan perusahaan, seperti penerimaan dan pembayaran utang kepada investor dan kreditor.
- d. Laporan Perubahan Ekuitas : Ikhtisar tentang perubahan modal suatu perusahaan yang terjadi selama jangka waktu tertentu. Laporan perubahan modal melaporkan bagaimana laba bersih dan dividen mempengaruhi posisi laporan keuangan perusahaan dalam suatu periode akuntansi. laba bersih yang dipeoleh setiap tahun akan meningkatkan saldo laba ditahan, sedangkan pembagian dividen kepada pemegang saham akan mengurangi saldo laba ditahan. Proses meningkatkan dan mengurangnya saldo ditahan ini menunjukkan hubungan antara laporan laba rugi dengan neraca, di mana saldo ditahan pada akhir periode akan dibawa ke saldo awal laba ditahan pada tahun berikutnya.

- e. Catatan atas Laporan Keuangan : Catatan yang disajikan secara sistematis untuk menghasilkan informasi dasar penyusunan laporan keuangan serta memberikan informasi yang relevan untuk memahami laporan keuangan.

Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban APBD

1. Cara Penyusunan APBD

- a) Pertama, pemerintah daerah menyusun RAPBD (Rancangan APBD). RAPBD disusun pemerintah daerah atas dasar usulan dari setiap perangkat belanja administrasi dan umum daerah yang diusulkan dalam bentuk RASK (Rancangan Anggaran Satuan Kerja).
- b) Pemerintah daerah mengajukan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas. Sebelum membahas RAPBD, DPRD menyosialisasikan RAPBD kepada masyarakat untuk mendapat masukan-masukan tersebut dicatat dan akan dibukukan sebagai lampiran.
- c) DPRD membahas RAPBD bersama dengan Tim Anggaran Eksekutif.
- d) RAPBD yang telah disetujui DPRD disahkan menjadi APBD untuk dilaksanakan.

2. Pelaksanaan APBD

Berdasarkan APBD yang sudah disahkan, Kepala Daerah menetapkan RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja). RASK yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah inilah yang akan di gunakan sebagai dasar pelaksanaan semua pengguna anggaran.

3. Pengawasan APBD

Agar tidak terjadi penyimpangan, pelaksanaan APBD harus diawasi Lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan APBD adalah DPRD dan pejabat internal yang diangkat oleh kepala daerah.

4. Pertanggung Jawaban APBD

Ada dua macam laporan pertanggungjawaban APBD yang di lakukan kepala daerah. Yaitu laporan pelaksanaan APBD triwulan yang di sampaikan setiap tiga bulan sekali, dan laporan pelaksanaan APBD Tahunan, yang disampaikan setiap akhir tahun.

Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam penelitian ini dilakukan perhitungan rasio efektivitas dan rasio efisiensi PAD yang dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah adalah pajak daerah. Hal ini karena terbatasnya data tentang potensi riil dari masing-masing sumber PAD dan data biaya langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan pemungutan dan data biaya yang langsung maupun yang tidak langsung. Dari table perhitungan diatas dapat dikatakan bahwa Dinas Pendapatan Daerah cukup efektif dalam merealisasikan pajak

daerah yang direncanakan dengan rata-rata rasio efektivitas pajak daerah yaitu 154.54 % hal ini menggambarkan kinerja yang baik. Analisis varians memberikan informasi tentang perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dan anggaran. Pemerintah daerah dapat di nilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanjanya tidak melebihi target yang telah ditetapkan. Sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang kurang baik.

KESIMPULAN

1. Kinerja pendapatan pemerintah kota sorong dilihat analisis varians, secara umum dapat dikatakan cukup baik meskipun belum terlampaunya target Anggaran di mana dari tahun 2015-2018 rata-ratanya hanya mencapai 16.88%.
2. Kinerja pendapatan pemerintah kota sorong dilihat dari analisis pertumbuhan pendapatan kota sorong tahun 2015-2018 cukup baik. Hal ini di tunjukan dari rata-rata pertumbuhan pendapatan dan PAD yang positif yaitu 88.7. Pertumbuhan PAD kota sorong dari tahun 2015-2018 baik, hanya saja pada Tahun 2018 mengalami penurunan.
3. Kinerja belanja pemerintah kota sorong dilihat dari analisis varians secara umum kinerja kota sorong dapat dikatakan baik karena dari tahun 2015-2018 dimana persentasenya berturut-turut dari tahun 2015-2018 yaitu dengan rata-rata 88.30%.
4. Pertumbuhan belanja kota sorong menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan rata-rata 69.8%.
5. Pemerintah Daerah perlu melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi, serta dalam penyetoran. Kemudian melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang objektif berdasarkan peraturan yang berlaku. Selain itu dapat melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan pemungutan PAD oleh Aparatur

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukri.2010. Telaah Reformasi Akuntansi Pemerintahan (Menuju Basis Akrua) Dalam Mewujudkan Good Governance.
- Bastian, Indra, 2006. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar, Penerbit Erlangga, Jakarta. Cetakan kedua. Bandung

- Komite Standard Akuntansi Pemerintahan 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 24 Tahun 2010. Jakarta. Departemen Keuangan
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta
- Noodiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra Dan Maulidah Rahmawati., 2007. Akuntansi Pemerintahan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2008. Akuntansi Pemerintah Daerah, Konsep dan Aplikasi.
<https://www.jasakonsultanakuntansi.com/laporan-keuangan-menurut-psak/>
<https://www.jurnal.id/id/blog/2017/jenis-jenis-laporan-keuangan-dalam-akuntansi.>